

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	GATRA	77	10-8-2002

PASIR LAUT

Pelajaran buat Profesor Garjunov

Armada Barat menahan tujuh kapal pengerukan pasir laut. Pengusaha pasir laut curiga, penahanan itu diwarnai kepentingan bisnis pihak tertentu.

PROFESOR Garjunov termangu di lepas pantai kawasan perairan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam, Riau. Dengan bobot mati sekitar 7.135 ton, kapal berbendera Rusia itu seperti tak acuh pada riak gelombang laut yang mengombang-ambing. Garjunov tak sendiri. Bersama enam kapal pengangkut dan pengeruk pasir lainnya, mereka dipaksa buang sauh di sekitar perairan Lanal Batam, Tanjungpinang, dan Tanjungbalai Karimun. "Ketujuh kapal itu diawasi TNI-AL," kata Panglima Komando Armada Kawasan Barat, Laksamana Muda Djoko Sumaryono, ketika meninjau Garjunov, Jumat pekan lalu.

Sejak dua pekan lalu, kapal-kapal nahas itu *nongkrong* di bawah pengawasan Lanal. Olivia V dan Jasmine, yang dioperasikan PT Penta Ocean itu, kepergok KRI Kodha 803 ketika sedang menyedot pasir laut di perairan Sakang, Karimun. Sedangkan Garjunov, Samsung Apollo, dan Vasco da Gama, yang dikelola PT Equator Reka Cipta, kepergok KRI Ajak dan KRI Sura di Selat Durian. Nasib serupa dialami Lange Wapper dan Alexander von Humboldt. Kapal keruk sewaan PT Citra Karimun Aditya itu dicokok di perairan Tanjungpinang oleh KRI Sigurot.

Armada Barat menyatakan, penahanan kapal-kapal tersebut untuk mencegah penyelundupan pasir laut. "Mereka tak memiliki surat atau dokumen yang dipersyaratkan," demikian bunyi siaran pers Dinas Penerangan TNI-AL, Senin pekan

lalu. "Itu namanya pembelajaran dan penegakkan hukum nasional," ujar Komandan Lanal Batam, Kolonel Adyaman A.S.

Toh, "pelajaran" yang diberikan penjaga perairan Indonesia itu malah membingungkan para pelaku bisnis pengerukan pasir laut Riau. "Semua kapal kami punya surat-surat lengkap," kata Riko Riswanda, Direktur Equator. Dokumen-dokumen penting, seperti izin kuasa penambangan dan persetujuan ekspor laut dari pemerintah daerah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sudah di tangan. Perizinan dari imigrasi dan syahbandar, serta surat izin berlayar dari Ditektorat Jenderal Perhubungan Laut, juga sudah masuk laci arsip. "Entah apa lagi alasan penangkapan oleh TNI-AL itu," kata Syukri, Humas Penta Ocean, yang juga mengaku sudah mengantongi dokumen lengkap.

Dari para awak kapal, Riko dan Syukri mendapat informasi bahwa awak KRI memalsukan dokumen yang hanya berupa fotokopi. Bila soal itu yang jadi alasan penangkapan, mereka yakin tak melanggar peraturan. "Tak mungkin setiap kapal mem-

bawa dokumen asli," kata Riko. Dengan keyakinan itu, Riko kemudian mengirim surat protes ke Panglima Armada Barat.

Pendapat Riko dibenarkan Ferry Yachya, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. "Selama perusahaan bisa menunjukkan dokumen asli dan beroperasi di zona yang diperuntukkan, tak ada soal," kata Ferry kepada Rully Nasrullah dari GATRA. Untuk amannya, ia menyarankan agar salinan dokumen tersebut dilegalisasi.

Tak mengherankan bila tindakan Armada Barat menahan kapal-kapal pasir itu mengundang kecurigaan. Seorang bos perusahaan bisnis pasir laut yang berdomisili di Jakarta mencium gelagat persaingan tak sehat di balik penahanan kapal-kapal tersebut. "Tindakan itu untuk mengganggu pesaing perusahaan yang dibeking Angkatan Laut," katanya, sambil menunjukkan dokumen kerja sama proyek yang terkait dengan kegiatan penambangan pasir laut antara TNI-AL dan sebuah perusahaan.

Rumor itu dibantah Armada Barat. "Tak ada pesanan pihak tertentu dalam kasus penahanan kapal pasir," ujar Laksamana Pertama Sugeng Waluyo R, Kepala Dinas Penerangan TNI-AL. Menurut dia, perintah pengawasan kapal ekspor pasir laut dilakukan atas sepengetahuan dan perintah Kepala Staf TNI-AL.

Tentang alasan penahanan tujuh kapal tadi, Panglima Armada Barat tetap berkeyakinan bahwa dokumen ekspor pasir laut harus ada di atas kapal setiap kali akan bergerak ke luar melakukan ekspor. "Dokumen ekspor pasir laut hanya berlaku untuk satu kali pengapalan, sehingga dapat dijadikan alat kontrol," kata Djoko Sumaryono. Kebijakan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kapal pengangkut pasir tak perlu dilengkapi dokumen ekspor, menurut Djoko, mempersulit pengawasan keabsahan ekspor. □

A. KUKUH KARSADI,
HENDRI FIRZANI, DAN NOVRIZAL



KEPERGOK TANPA DOKUMEN ASLI

DOK. LANTANG